

BAB III

HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN KUBA ERA PEMERINTAHAN FIDEL CASTRO DAN RAUL CASTRO

Bab ini akan memaparkan dinamika hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba, dimulai dari latar belakang terbentuknya hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba. Kemudian hubungan antara Amerika Serikat di era pemerintahan Fidel Castro yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba. Penulis juga akan memaparkan hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba di era pemerintahan Raul Castro.

A. Sejarah Hubungan Amerika Serikat dengan Kuba

Pada tahun 1800-an Amerika Serikat telah menjalin hubungan dengan Kuba dibawah koloni Spanyol (C.C. Copeland, C.M. Jolly, dan Henry Thompson, 2011). Letak geografis Amerika Serikat dengan Kuba merupakan alasan utama Amerika Serikat untuk melakukan hubungan dengan Kuba dalam bidang perdagangan, pariwisata, maupun investasi. Walaupun Kuba dibawah koloni Spanyol, Amerika Serikat tetap menjaga hubungan baik dengan Kuba. Sebab, Amerika Serikat khawatir Kuba akan dikuasai oleh negara lain yang ada di Eropa.

Hubungan yang dibangun oleh Amerika Serikat terhadap Kuba ini diharapkan Amerika Serikat untuk mendapatkan simpati dari Kuba, sebab Kuba yang masih ada dibawah koloni Spanyol ini banyak mengalami kemerosotan terlebih dibidang perdagangan. Pada April 1898 merupakan titik terang untuk kemerdekaan Kuba atas Spanyol yang ditandai dengan pecahnya perang anatara Amerika Serikat dengan Spanyol (Julio, 2015). Terlebih adanya pemberontakan oleh gerilyawan Kuba yang dipimpin oleh Jose Marti terhadap Spanyol, pemberontakan ini dilakukan karena adanya tindakan represif Spanyol berkibat pada Kuba sebagai negara yang dilanda perang (Revolusi Kuba, 2017).

Pemberontakan ini pun didukung oleh Amerika Serikat dengan mengirimkan kapal USS Maine untuk melindungi warga negara Amerika Serikat yang ada di Kuba.

Pecahnya perang antara Amerika Serikat dengan Spanyol ini disebabkan oleh insiden meledaknya kapal USS Maine di pelabuhan Havana yang misterius. Amerika Serikat mencurigai Spanyol yang melakukan sabotase peladakan terhadap kapal USS Maine yang dikirimkan oleh Amerika Serikat pada saat itu. Peperangan antara Amerika Serikat dengan Spanyol ini memakan ribuan korban jiwa dari tentara masing-masing negara, karena keduanya saling melakukan penyerangan. Hingga akhirnya pada 12 Desember 1898 kedua negara sepakat untuk menghentikan perang yang menghasilkan *Treaty of Paris 1898*, perjanjian ini menghasilkan penyerahan kekuasaan wilayah Guam, Puerto Riko, termasuk Kuba kepada Amerika Serikat (Gunawan, 2017).

Kemerdekaan Kuba dari koloni Spanyol dengan bantuan Amerika Serikat ini tidak menjadikan Kuba serta-merta menjadi negara yang berdiri sendiri. Kuba masih menjadi koloni Amerika Serikat sampai pada akhirnya tanggal 20 Mei 1902 Kuba mendapatkan kemerdekaan yang dibatasi oleh *Amandemen Platt* (Usman, 2006). Dengan adanya *Amandemen Platt* ini memudahkan Amerika untuk menyebarkan pengaruh liberalnya dan mengontrol jalannya pemerintahan Kuba baik dari segi internal maupun eksternal. *Amandemen Platt* ini juga mengharuskan Kuba untuk menyewakan Teluk Guantanamo kepada Amerika Serikat (Kamandoko, 2010).

Selain dijalankannya *Amandemen Platt*, hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba juga menghasilkan kesepakatan diantaranya:

- 1) Perjanjian Timbal Balik tahun 1903 yang bertujuan untuk menghidupkan kembali

industri gula yang rusak akibat perang dan memfasilitasi ekspansi 17 kali lipat antara tahun 1900 dan 1925. Perjanjian ini menguntungkan pihak Amerika Serikat, sebab tarif harga gula yang masuk ke Amerika Serikat mendapat pengurangan 20%. Selain itu pertukaran barang antara Amerika Serikat dengan Kuba pun mendapatkan penurunan 20-40%.

- 2) Kuba menyewakan Bahia Honda dan Guantanamo untuk dijadikan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat di Kuba. Bahia Honda menjadi pangkalan militer kedua Amerika Serikat setelah Guantanamo, Amerika Serikat akan menjadikan Bahia Honda pangkalan militer yang lebih bagus dalam segi fasilitas dari Guantanamo (Hernandez, 2010).

Hubungan timbal-balik antara Amerika Serikat saling menguntungkan ini lebih kepada pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat lebih mendominasi perekonomian Kuba, terlihat pada investor-investor Amerika Serikat yang masuk ke Kuba memiliki saham pada bidang real estate, sistem kereta api, maupun industri telepon dan listrik.

Pada 1904 Amerika Serikat menyetujui pengakuan Kuba atas *Isle Pines* yang dikenal dengan *Hey-Quesada Treaty* yang kemudian diratifikasi pada tahun 1925. Pada bulan Mei 1912 terjadi pemberontakan dari kelompok Afro-Kuba terhadap pemerintahan Kuba, disini Amerika Serikat ikut serta membantu Kuba dalam menekan pemberontakan dengan intervensi militer dengan tujuan melindungi properti Amerika Serikat yang ada di Kuba. Hingga terpilihnya presiden Gerardo Machado pemberontakan ini masih terjadi, pemberontakan Machado menentang adanya *Amandemen Platt* dan tarif harga jual gula kepada Amerika Serikat (Green).

Pemerintahan Machado ini tidak berlangsung lama yang kemudian digantikan oleh Alberto Herrera (1874-1954), sebab Machado tidak mendapatkan bantuan militer untuk melakukan pemberontakannya. Setelah adanya pergantian presiden muncul seorang mantan militer Kuba yakni Fulgencio Batista yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Persekutuan ini memunculkan rencana pengambilalihan kekuasaan Kuba dibawah pemerintahan Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hingga pada 4-5 September 1933 terjadi peristiwa yang dikenal sebagai *Sergeants' Revolt* (Pemberontakan Sersan) atau Revolusi Kuba 1933 (Matanasi, 2017). Adanya Revolusi Kuba menyebabkan adanya dua pergantian presiden Kuba yakni Manuel de Céspedes y Quesada dan Ramon Grau San Martin yang telah di *setting* oleh Batista untuk di gulingkan dari kekuasaannya. Hingga pada akhir 1940 Batista mencalonkan dan terpilih sebagai presiden Kuba karena persekutuannya dengan Duta Besar Amerika Serikat yakni Sumner Welles dalam peristiwa *Sergeants' Revolt*.

Pada 1944 Batista digantikan oleh Carlos Prío tetapi tidak bertahan lama yang kemudian digantikan lagi oleh Batista yang menjabat antara tahun 1952 sampai 1958 (2 Periode Revolusi Kuba, 2014). Terpilihnya kembali Batista sebagai presiden Kuba menimbulkan pergolakan, sebab masa pemerintahan Batista dianggap merugikan terutama merugikan rakyat Kuba. Pergolakan ini mengakibatkan adanya pemberontakan oleh rakyat Kuba terhadap pemerintahan Batista pada saat itu. Namun, kegagalan terjadi pada pemberontakan yang pertama kali dilakukan oleh rakyat Kuba terhadap pemerintahan Batista. Kegagalan ini menimbulkan reaksi dari oposan Fidel Castro untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Batista. Fidel melakukan pemberontakan bersama adiknya Raul Castro dan dokter muda bernama Che Guevara. Puncak dari pemberontakan ini mengakibatkan perginya Batista meninggalkan istananya pada Januari 1959. Dengan dukungan dari rakyat Kuba, gulingnya pemerintahan Fulgencio Batista ini digantikan oleh Fidel Castro (Matanasi, 2017).

B. Hubungan Amerika Serikat dengan Kuba Era Pemerintahan Fidel Castro

Setelah menggulingkan rezim Batista, Fidel Castro mendapatkan banyak dukungan dari rakyat Kuba yang akhirnya pada 16 Februari 1959 dilantik menjadi presiden (Handoko, 2018). Pada awal pemerintahannya Fidel melakukan revolusi besar-besaran terhadap pemerintahan Kuba pada saat itu yakni dengan mengesahkan Reformasi Agraria dan menjadi kebijakan yang pertama kali dikeluarkan olehnya. Fidel juga membatasi kepemilikan tanah oleh pihak asing, bahkan ia pun melegitimasi hukum untuk menyita tanah Kuba yang dimiliki oleh perusahaan asing. Sasaran utamanya yaitu *United Fruit Company*, sebuah perusahaan perkebunan buah-buahan yang sahamnya dimiliki oleh sekelompok pejabat Amerika Serikat, dan melakukan perubahan perekonomian Kuba yang mengarah kearah komunisme. Walaupun Castro mengatakan bahwa rezimnya bukan musuh kapitalis, namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Fidel memberikan dampak kerugian bagi Amerika Serikat (Pambudi, 2007).

Pada April 1959 Castro bertemu Wakil Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dalam kunjungan resminya ke Washington. Kemudian Nixon menuliskan bahwa Amerika Serikat tidak punya pilihan selain untuk mencoba memperhatikan pemimpin sayap kiri di arah yang benar. Akan tetapi Castro tetap menjalankan revolusi yang mengakibatkan Amerika Serikat melakukan pengurangan kuota impor gula Kuba hingga 7 juta ton. Pengurangan kuota gula tersebut berdampak buruk bagi Kuba, karena gula merupakan sumber pendapatan devisa utama bagi Kuba. Ini merupakan bentuk respon Amerika Serikat terhadap Kuba, karena telah menasionalisasi properti dan bisnis Amerika Serikat tidak kurang dari USD 850 juta (Pambudi, Fidel Castro: 60 Tahun Menentang Amerika, 2007).

Respon dari Amerika Serikat dengan adanya pengurangan kuota impor gula ini pun ditanggapi oleh Kuba dengan mulai menjalin hubungan dengan musuh besar

Amerika Serikat yakni Uni Soviet. Kuba melakukan perjanjian dengan Uni Soviet, selain itu juga Kuba menerima pinjaman uang dari Uni Soviet. Terjalannya hubungan kerjasama antara Kuba dan Uni Soviet, yang bertujuan untuk tetap menjaga kesejahteraan di Kuba malah menjadi sebuah kesalahan yang besar. Hubungan kerjasama antara Kuba dan Uni Soviet menimbulkan ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba, karena Kuba telah melakukan hubungan kerjasama dengan musuh besar Amerika Serikat (Obituari: Castro adalah Kuba dan Kuba adalah Castro, 2016).

Pada tanggal 17 maret 1960 Eisenhower memberikan wewenang kepada agen intelejen Amerika Serikat yakni *Central Intelligence Agency* (CIA) untuk melakukan pelatihan kepada para pemberontak Castro yang diasingkan dan tinggal di Miami, serta mendukung mereka untuk melakukan invasi ke Kuba. Wewenang yang diberikan Eisenhower kepada CIA dalam melakukan empat aksi politik yaitu :

1. Membentuk kelompok oposisi moderat di pengasingan;
2. Menciptakan sebuah stasiun radio yang siarannya dapat mencapai wilayah Kuba atau di Swan Island yang berada di selatan Kuba;
3. Menciptakan sebuah intelejensi rahasia dan organisasi yang responsive terhadap pemerintah dan arahan oposisis pengasingan;
4. Memulai pelatihan pasukan militer di luar Kuba.

Setelah dilatih dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat, mereka kemudian membentuk kesatuan militer yang dikenal dengan *La Brigda* atau Brigade 2506. Kelompok yang dikenal sebagai Brigade 2506 pada awalnya adalah 28 anggota, termasuk 10 mantan perwira militer Kuba yang direkrut oleh Dr. Manuel Artime, kepala *Movimiento de Recuperación Revolucionaria* (MRR). Setelah pelatihan di kamp-kamp

rahasia di Everglades Florida pada awal Maret 1960, brigade yang berkembang memindahkan basisnya ke Sierra Madre di Guatemala, yang membanggakan iklim yang mirip dengan Kuba dan pemerintah yang ramah. Setelah pembentukan *La Brigade* ini, pada 3 Januari 1961 Eisenhower menutup kedutaan Amerika di Havana dan resmi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kuba yang diharapkan dapat membendung penyebaran komunisme (Pruitt, 2016).

Setelah melakukan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kuba Eisenhower digantikan kedudukannya oleh John F. Kennedy. Disini Kennedy mewarisi program CIA untuk melatih dan mempersenjatai *La Brigade* ketika dia menjadi presiden pada tahun 1961. Ketika itu banyak penasihat militernya meragukan keberhasilan atas serangan amfibi yang dilakukan dengan sekelompok pemberontak bersenjata ringan, tetapi Kennedy tetap memberi lampu hijau atas serangan tersebut.

Akhirnya pada tanggal 17 April 1961 sekitar 1.200 orang buangan yang dipersenjatai oleh Amerika Serikat dan dengan menggunakan pesawat pendarat Amerika, pasukan ini mengarungi pantai di Teluk Babi di Kuba. Invasi tersebut diawali dengan peluncuran delapan pasang pesawat diterbangkan oleh pilot *La Brigade* ke Teluk Babi. Setelah itu anggota *La Brigade* memasuki kawasan Kuba dan bertemu langsung dengan militer Kuba yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pasukan *La Brigade*. Pasukan *La Brigade* ini dengan mudah dikalahkan oleh pasukan militer Kuba, sebab sebelum terjadinya serangan ini Castro telah mendengar berita akan adanya penyerangan dari pasukan *La Brigade* terhadap Kuba. Castro pun telah memindahkan pesawat dan kapal serta persenjataan ke tempat lain agar rencana dari *La Brigade* tidak berhasil dan mampu diatasi dengan mudah oleh pasukan militer Kuba (Staff, 2009).

Setelah adanya peristiwa penyerangan oleh *La Brigade* terhadap Kuba, Castro pun meminta bantuan militer

kepada Uni Soviet untuk memperkuat kekuasaannya di Kuba. Uni Soviet pun merespon permintaan bantuan dari Castro dengan membangun instalasi nuklir di Kuba yang mengakibatkan adanya peristiwa Krisis Misil Kuba terjadi pada 14-28 Oktober 1962. Selama Krisis Rudal Kuba, para pemimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam ketegangan politik dan militer selama 13 hari pada bulan Oktober 1962 atas pemasangan rudal Soviet bersenjata-nuklir di Kuba, hanya 90 mil dari pantai Amerika Serikat (Sejarah, 2017).

Dalam sebuah pidato TV pada 22 Oktober 1962, Presiden John Kennedy (1917-63) memberi tahu orang Amerika Serikat tentang keberadaan rudal, menjelaskan keputusannya untuk memberlakukan blokade laut di sekitar Kuba dan menegaskan bahwa Amerika Serikat siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk menetralkan ancaman yang dirasakan ini terhadap keamanan nasional. Mengikuti berita ini, banyak orang takut dunia berada di ambang perang nuklir. Namun, bencana dihindari ketika Amerika Serikat setuju dengan tawaran pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev (1894-1971) untuk menghapus misil Kuba sebagai imbalan bagi Amerika Serikat yang berjanji untuk tidak menginvasi Kuba. Kennedy juga diam-diam setuju untuk menghapus rudal Amerika Serikat yang ada di Turki (Staff, Cuban Missile Crisis, 2010).

Pada tahun 1963 kedudukan Kennedy digantikan oleh Lyndon Johnson, kebijakan yang dikeluarkan oleh Johnson yakni memperkuat embargo dan mencoba mencegah penjualan nikel Kuba maupun negara-negara blok Uni Soviet dan menyetujui program dari CIA untuk membunuh Castro dan mendukung kelompok-kelompok gerilya anti-Castro. Kemudian tahun 1969 Johnson digantikan oleh Richard Nixon, dalam masa pemerintahannya ia meningkatkan aktivitas anti-Castro, termasuk penangkapan para nelayan Kuba. Nixon juga berupaya mencegah penjualan nikel Kuba ke negara-negara blok Uni Soviet. Pada tahun 1974 Nixon digantikan oleh

Gerald Ford, ia menjabat di saat serangan-serangan terhadap misi-misi diplomatik Kuba di luar negeri yang semakin meningkat dan serangan terhadap pesawat Kuba yang menewaskan 73 orang. Gerald Ford pun mengizinkan kunjungan pertama para pebisnis Amerika Serikat ke Kuba dan meringankan embargo.

Kebijakan demi kebijakan Amerika Serikat terhadap Kuba terus berubah sesuai dengan kebijakan dari presiden terpilih pada saat itu. Lalu pada tahun 1978, pemerintahan Presiden Carter terpilih sebagai presiden sekaligus menandai awal dari kebijakan baru terhadap Kuba. Carter mengurangi embargo terhadap Kuba, membuka sebuah bagian kepentingan Amerika Serikat di Havana dan mengizinkan sebuah bagian kepentingan Kuba dibuka di Washington. Memungkinkan warga Kuba di pengasingan bepergian ke tanah air mereka. Kemudian Amerika Serikat menghapus larangan pengiriman uang untuk pertama kalinya sejak putusnya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba pada tahun 1963. Tetapi pengiriman uang dengan cepat mengalami regulasi dan kontrol, sehingga sulit untuk mentransfer uang yang jumlah maksimalnya USD 500 kepada keluarga mereka, dan dana mereka itu harus digunakan semata-mata untuk membantu kerabat dengan biaya emigrasi (Hutapea, 2016).

Sebelumnya pada tahun 1977 dalam pidatonya Carter mengatakan *“I have concluded that we should attempt to achieve normalization of our relations with Cuba.”* Bahkan ia juga menyatakan mengenai kelompok pengasingan yang berbasis di Amerika Serikat *“The Attorney General should take all necessary steps permitted by law to prevent terrorist or any illegal actions launched from within the United States against Cuba”* (McPherson, A. L. , 2006), yang menjadi awal normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba.

Pada 1981 Carter digantikan oleh Ronald Reagan, dengan terpilihnya Reagan ini kembali memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba. Sebab Reagan terkenal sebagai aktor politik yang antikomunisme, bahkan setelah terpilih dan menduduki kursi presiden Reagan lantang menyuarakan antikomunisme. Pada prinsipnya, doktrin Reagan merupakan kebijakan administrasi Reagan yang menekankan pada semangat kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*), dan nilai-nilai demokratis (*democratic values*) (Patra, 2013). Doktrin ini beraspirasi untuk mengakhiri ketidakadilan di manapun melalui upaya-upaya antikomunisme. Untuk mencapai tujuan ini, Reagan menetapkan bahwa segala bentuk perlawanan terhadap komunisme dapat dibenarkan (*justifiable*). Doktrin ini pula yang menjadi nilai fundamental dari masa pemerintahan Reagan, terutama dengan dukungan yang kental terhadap para pejuang kebebasan (*freedom fighters*) di berbagai negara komunis. Akibat dari doktrin Reagan ini, kekuatan komunis di seluruh dunia menurun drastis

Setelah masa jabatan Reagan habis sebagai presiden Amerika Serikat kemudian digantikan oleh George H. W. Bush. Kemunduran komunisme di dunia Kuba tidak dianggap lagi sebagai ancaman oleh Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat tetap memberlakukan embargo terhadap Kuba dengan harapan untuk menghancurkan rezim Fidel Castro. Bush juga melarang anak perusahaan Amerika Serikat melakukan perdagangan dengan Kuba dan tetap memberlakukan larangan perjalanan ke Kuba yang disampaikan dalam Kongres Oktober 1992 (Hutapea, 2016).

Embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat pun masih berlangsung era pemerintahan Clinton pada tahun 1993-2001, kebijakan yang diterapkan oleh Clinton tidak jauh berbeda dengan Bush dimana kebijakan tersebut tetap menimbulkan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Kuba. Pada tahun 1994, Amerika Serikat melarang semua pengiriman uang ke Kuba, bahkan Clinton memiliki banyak

pernyataan kasar untuk kuba terkait dengan pelanggaran HAM. Clinton secara terbuka mengusulkan pengangkatan embargo terhadap Kuba dan memberikan respon dengan menerapkan kebijakan *The Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996 (Helms–Burton Act.)* Ini merupakan hukum federal Amerika Serikat yang memperkuat dan melanjutkan embargo Amerika Serikat terhadap Kuba (COHA, 2011).

Helms–Burton Act inipun memperpanjang aplikasi teritorial embargo yang awalnya diterapkan untuk perusahaan asing yang ada di Kuba, kemudian Amerika Serikat akan menghukum perusahaan asing yang diduga menjual properti yang sebelumnya dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat tapi disita oleh Kuba setelah adanya revolusi Kuba. *Helms–Burton Act* ini juga berlaku pada kepemilikan properti warga negara Kuba yang kemudian pindah menjadi warga negara Amerika Serikat. Clinton akan mencabut kebijakannya jika Kuba mau menerapkan sistem demokrasi di Kuba

President George W. Bush menjadi presiden terakhir yang melakukan kebijakan pengetatan embargo terhadap pemerintahan Fidel Castro sebelum pada akhirnya Fidel menyerahkan kekuasaan kepada adiknya Raul Castro. Kebijakan Bush hanya melanjutkan apa yang sudah ditetapkan presiden-presiden sebelumnya (Gjelten, 2009). Namun, perbedaan Bush dengan presiden lainnya adalah Bush menginginkan untuk membangun hubungan baru yang lebih baik dengan Amerika Latin termasuk Kuba. Sebab, Kuba mulai menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di Amerika Latin dengan tujuan mengintegritas perekonomian tanpa campur tangan Amerika Serikat dan adanya perubahan serta pembaruan dalam lebiralisasi ekonomi oleh rezim Kuba (Basuki, 2017). Hal inilah yang membuat Bush khawatir akan lunturnya pengaruh Amerika Serikat di Amerika Latin terutama terhadap Kuba.

Perhatian Bush yang tadinya akan berfokus pada Amerika Latin beralih ke Timur Tengah pasca peristiwa 9/11, Bush lebih gencar memerangi teroris yang disinyalir bersembunyi di Timur Tengah. Selain itu, menyempitnya kegiatan regional Amerika Serikat di Amerika Latin yang hanya berfokus pada usaha memerangi narkoba dan permasalahan imigrasi. Hal ini yang menyebabkan berkurangnya perhatian Amerika Serikat terhadap aspek-aspek lain seperti perdagangan, investasi, dan infrastruktur, dan usaha-usaha lain untuk mempertahankan pengaruhnya di Amerika Latin (Serbin, 2015).

C. Hubungan Amerika Serikat dengan Kuba Era Pemerintahan Raul Castro

Pada sub bab Hubungan Amerika Serikat dengan Kuba Era Pemerintahan Raul Castro ini terdapat pergantian presiden antar masing-masing negara. Selain itu, adanya upaya yang dilakukan antara Amerika Serikat dengan Kuba untuk melakukan normalisasi hubungan antara keduanya yang telah lama membeku.

C.1. Pergantian Presiden di Kuba

Pergantian presiden di Kuba disebabkan oleh kondisi Fidel Castro yang semakin memburuk, kemudian digantikan sementara oleh adiknya Raul Castro. Fidel Castro meninggalkan kekuasaan untuk menjalani perawatan pada Juli 2006 tetapi baru resmi mengundurkan diri sebagai panglima tertinggi dan presiden Kuba pada Februari 2008. Castro mengatakan

"begitu saya memahami bahwa penyakit itu fatal, saya tidak ragu melepas tugas saya sebagai presiden" (BBC, 2015).

Setelah pengunduran Raul Castro diangkat sebagai presiden Kuba menggantikan kakaknya. Dia mengatakan dalam sebuah pidato bahwa Washington terus berupaya melemahkan Kuba sejak Fidel Castro dikesampingkan oleh

operasi yang mengancam jiwa.. Dia menyatakan harapannya bahwa Amerika Serikat akan membuang kebijakannya yang gagal. Raul juga mengatakan,

“Jika pemerintah Amerika Serikat berikutnya mengesampingkan arogansi dan memutuskan untuk berbicara dengan cara yang beradab, itu disambut baik. Jika tidak, kami siap untuk terus menghadapi kebijakan permusuhan mereka selama 50 tahun lagi,” dalam pidato liburan Hari Revolusi (Israel, 2007).

Pada masa jabatannya Raul Castro menghadapi utang luar negeri yang besar, dan kesulitan ekonomi di tengah krisis ekonomi global. Pada situasi ini, Raul Castro mulai meliberalisasi sebagian besar ekonomi Kuba yang dikuasai negara dan menggeser retorika menjauh dari pemikiran tradisional antagonis pemerintah terhadap bisnis swasta. Castro juga melemahkan pembatasan kebebasan pribadi, termasuk kepemilikan barang-barang konsumsi tertentu dan bepergian ke luar negeri. Reformasi Castro diantaranya:

1. Desentralisasi pada sektor pertanian dengan menawarkan perseorangan dan koperasi untuk disewakan mengolah lahan pertanian milik negara.
2. Pembatasan pada usaha kecil dan mengeluarkan lisensi baru untuk pekerjaan sektor jasa.
3. Meliberalisasi pasar *real estate*, memungkinkan orang Kuba membeli dan menjual properti pribadi.
4. Menghilangkan persyaratan birokrasi yang memberatkan bagi rakyat Kuba untuk mendapatkan pemerintah izin untuk bepergian ke luar negeri.
5. Memperluas akses dalam bidang barang-barang konsumsi, termasuk pemutar DVD, microwave, dan telepon seluler, dan layanan seluler dan Internet.

Laporan dari *Center for Democracy in the Americas* (CDA) menyatakan bahwa reformasi Castro terfokus pada penerimaan kekuatan pasar yang dapat memainkan peran dalam kebijakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi harus menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan ekonomi (Lee J. , 2009).

Upaya terus dilakukan oleh Raul Castro dengan adanya kebijakan pada bidang politik dan ekonomi di Kuba, dalam segi ekonomi Raul mulai menerapkan reformasi ekonomi di Kuba yang tujuannya untuk menstabilkan keadaan ekonomi di Kuba. Dalam bidang politik, Raul mulai mengganti sebagian besar jajaran pimpinan Partai Komunis dan melakukan kampanye untuk memerangi korupsi negara (Roldão, 2013). Tujuannya untuk mengurangi campur tangan pemerintah terhadap sejumlah sektor diantaranya, sektor pertanian, pedagang eceran, dan konstruksi (Kuba Lakukan Reformasi Ekonomi, 2011). Hal ini membuka peluang terhadap swasta berskala kecil maupun menengah untuk menggantikan peran pemerintah yang tadinya terlibat dalam sejumlah sektor tersebut. Raul juga perlahan mengurangi subsidi terhadap pangan dan layanan publik, selain itu Kuba juga mulai memodernisasi kebijakan migrasinya.

Disaat Raul Castro sedang memperbaiki situasi ekonomi dan politik yang ada di Kuba, Amerika Serikat yang secara tradisional merupakan *rival* dari negara Kuba pada era pemerintahan Fidel Castro juga mengalami perubahan kepemimpinan. Di Amerika Serikat, Obama terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang memberikan perubahan terhadap Amerika Latin termasuk Kuba (5 Alasan Mengapa Obama Mengubah Kebijakan AS Terhadap Kuba, 2016).

C.2. Pergantian Presiden di Amerika Serikat

Barack Obama terpilih sebagai presiden Amerika Serikat ke-44 pada tahun 2009 menjadi sejarah baru bagi Amerika Serikat, Obama merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang berkulit hitam (Taufik, 2016). Pada masa

kampanye Obama memiliki slogan “*Yes, We Can Change*”, yang menjadi salah satu kunci kemenangan Obama. Selain itu, terkait dengan proses demokrasi di Amerika Serikat, Obama mampu membangun sistem yang mendorong partisipasi publik menjadi lebih luas. Hal ini yang mempengaruhi sukarelawan untuk bergerak dan mendukung Obama untuk menjadi presiden kala itu (detiknews, 2009).

Obama mengatakan,

"Jika seseorang di luar sana yang masih meragukan bahwa Amerika Serikat adalah tempat di mana segala hal menjadi mungkin, pada mereka yang masih bertanya-tanya apakah mimpi para pendiri (Amerika Serikat) masih bertahan hingga saat ini, yang masih mempertanyakan kekuatan demokrasi. Malam ini adalah jawabannya,"

dalam pidato kemenangannya 5 November 2014 (Kristanti, 2014). Ini menjadi awal mula perubahan Amerika Serikat oleh Obama, ia mengatakan bahwa cara *hard power* tidak efektif dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Amerika Serikat terdahulu. Obama menganggap cara *hard power* ini akan memberikan dampak yang buruk bagi citra Amerika Serikat di kancah internasional. Maka dengan menggunakan cara *soft power* Obama mulai mengevaluasi dan menjalankan pemerintahan Amerika Serikat yang seharusnya.

Obama juga mengatakan,

"Saya tidak akan mengatakan bahwa kondisinya lebih baik. Saya pikir dalam banyak hal, kondisinya lebih buruk. Tetapi kapasitas beberapa oposisi lebih baik dari sebelumnya" (Rayman, 2014).

Obama menggunakan cara diplomasi dalam kebijakannya ketimbang melibatkan operasi militer Amerika Serikat, ini merupakan salah satu perubahan yang berbeda 180 derajat dengan presiden terdahulu. Dibawah kepemimpinan

Obama, Amerika Serikat membangun lembaga internasional, koalisi yang dapat bertindak secara efektif, dan promosi norma, aturan, hukum, cita-cita dan nilai-nilai yang menciptakan kemakmuran dan perdamaian yang lebih besar, tidak hanya di internal tetapi dari eksternal juga.

Obama mulai mewujudkannya dalam dalam suatu pertemuan dengan perwakilan beberapa negara di Kairo pada bulan Juni 2009, dalam kesempatan itu Obama mengungkapkan arah perpolitikan Amerika Serikat dibawah kekuasaannya. Obama menyatakan, bahwa Amerika Serikat akan mengutamakan jalan diskusi atau dialog untuk mencapai suatu kesepakatan, menghormati setiap kerjasama bilateral maupun multilateral, mengubah cara-cara bersosialisasi yang lebih bersahabat (Lagon, 2011, hal. 69).

Obama tidak lagi memberikan ancaman maupun sanksi terhadap negara yang tercatat sebagai musuh dari Amerika Serikat, sebaliknya Obama malah merangkul negara-negara yang tercatat sebagai musuh dari Amerika Serikat oleh presiden terdahulu. Obama akan menggunakan diplomasi sebagai alat untuk memperbaiki hubungan yang kurang harmonis antara Amerika Serikat dengan negara-negara musuh yang kemudian diwujudkan dengan adanya hubungan bilateral. Hal ini menandai arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang berbanding terbalik dengan Presiden Amerika Serikat sebelumnya terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuh.

Arah politik luar negeri Amerika Serikat berubah dibawah kekuasaan Barack Obama, dibawah kekuasaan Obama lebih bersahabat dengan negara-negara yang dulunya dianggap sebagai musuh oleh Amerika Serikat. Perubahan kebijakan Amerika Serikat juga mempengaruhi hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba yang sebelumnya membeku. Tercatat sekitar 55 tahun Amerika Serikat menjadikan Kuba sebagai musuh dari Amerika Serikat, dan dibawah kekuasaan Obama ini akan menrubah status Kuba yang tadinya “musuh”

menjadi “kawan.” Obama merasa bahwa Amerika Serikat tidak bisa memungkiri bahwa Kuba pernah menjadi kawan Amerika Serikat, status inilah yang akan diperjuangkan oleh Obama melalui pembukaan hubungan diplomatik dengan Kuba.

C.3. Upaya Normalisasi Hubungan Amerika Serikat dengan Kuba

Kebijakan Obama terhadap Kuba diawali dengan menghilangkan sanksi-sanksi yang sebelumnya diberikan Amerika Serikat terhadap Kuba dan Amerika Serikat memutuskan untuk mengakhiri kebekuan hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba yang masih berada dibawah sistem sosialis. Karena pada bab sebelumnya, dalam pidato Raul Castro mengatakan akan tetap mempertahankan sistem sosialis komunis dalam pemerintahannya sebagai warisan dari kakaknya Fidel Castro. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi kebijakan Obama yang akan mengakhiri kebekuan hubungan Amerika Serikat dengan Kuba dan membuka kembali hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba.

Ini merupakan langkah penting dan bersejarah Amerika Serikat dibawah kekuasaan Obama, pasalnya perbedaan ideologi, embargo ekonomi yang diterapkan terhadap Kuba, anggapan Amerika Serikat bahwa Kuba sebagai terorisme yang menjadi ancaman untuk Amerika Serikat ini berakibat tidak adanya kebekuan antara kedua negara. Kebijakan maupun sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Kuba ini masih bertahan walupun presiden di Amerika Serikat sudah berganti sebanyak 10 kali. Obama menjadi satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang memiliki inisiatif dalam menghadapi kebekuan antara Amerika Serikat dengan Kuba.

Upaya terus dilakukan oleh Obama hingga pada 13 April 2009 menjadi titik terang pembukaan kembali hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba. Sebab, sekretaris pers Robert Gibbs yang bergabung dengan Direktur Senior

untuk Urusan Belahan Bumi Barat di Dewan Keamanan Nasional dan Restrepo mendapatkan pesan penting mengenai perubahan kebijakan Amerika Serikat. Robbert Gibbs menyampaikan pesan penting dari Presiden Obama dalam pembukaan *Daily Press Briefing* yang dihadiri oleh beberapa pejabat penting Amerika Serikat. Robbert Gibbs mengungkapkan,

“Today, President Obama has directed that a series of steps be taken to reach out to the Cuban people to support their desire to enjoy basic human rights and to freely determine their country’s future. The president has directed the Secretaries of State, Treasury and Commerce to carry out the actions necessary to lift all restriction on the ability of individuals to visit family members in Cuba. He’s further directed that steps be taken to enable the freer flow of information among the Cuban people and between those in Cuba and the rest of the World , as well as to facilitate the delivery of humanitarian items directly to the Cuban people.”

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Gibbs, Obama menginginkan Kuba menjadi negara yang lebih demokratis (Lee, 2009). Obama menginginkan Kuba untuk menghargai kebebasan dasar manusia yang meliputi hak asasi manusia dan kebebasan individu yang selama ini di kekang oleh Rezim Fidel Castro. Untuk mewujudkan konstruksi dalam upaya menjadikan Kuba sebagai negara yang demokratis, Amerika Serikat menghapus kebijakan pembatasan wisata negara dan pengiriman uang antar kedua negara. Langkah ini dianggap efektif untuk mewujudkan konstruksi sosial yang akan dibangun oleh Amerika Serikat terhadap Kuba, sebab jika kebijakan Amerika Serikat yang sebelumnya tetap masih diterapkan di Kuba bisa menjadi hambatan untuk Amerika Serikat. Selain itu, ini juga diharapkan untuk meningkatkan komunikasi antar kedua warga negara serta memudahkan dalam proses pengiriman

informasi hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi terkait dengan penghormatan atas hak dasar setiap individu, hak politik maupun ekonomi melalui sikap dan perilaku dari Amerika Serikat.

Kebijakan Obama mendapat respon positif dari Raul Castro sebagai Presiden Kuba, Raul mendukung adanya upaya yang akan dilakukan Obama terkait hubungan antar kedua negara. Raul menyatakan kesediannya untuk mengadakan perundingan dengan Amerika Serikat mengenai kebijakan Obama terkait isu HAM. Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi negara-negara Amerika dan Karibia di Trinidad dan Tobago (Prof.Dr.J.M Papasi, Dewi Saputri, dan M. Bayu Saputra). Warga Kuba pun turut mendukung respon positif yang diberikan oleh Raul Castro mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Kuba. Dukungan dari warga Kuba ini tidak semata karena isu HAM, tetapi juga karena adanya hubungan kekeluargaan antara warga Amerika Serikat dengan Kuba. Sehingga upaya Obama untuk melakukan pembukaan kembali hubungan diplomatik dengan Kuba dianggap sebagai kebijakan yang paling berbeda dan belum pernah ditempuh oleh presiden Amerika Serikat sebelumnya.

Pada tahun 2009 pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk mengeluarkan paket kebijakan *Reaching Out Cuban People*. Kebijakan tersebut mengandung empat poin penting diantaranya : *Lift All Restrictions on Family Visits to Cuba, Remove Restrictions on Remittances, Authorize Greater Telecommunications Link with Cuba, Revise Gift Parcel Regulations*. Kebijakan *Reaching Out Cuban People* menjadi langkah paling penting untuk kembali bernostalgia dengan Kuba, selain itu kebijakan ini juga dianggap sebagai wujud nyata dari keseriusan Amerika Serikat untuk kembali menjalin hubungan yang lebih baik dengan Kuba.

Poin pertama dari kebijakan *Reaching Out Cuban People* adalah *Lift All Restrictions on Family Visits to Cuba* yang berisikan kemudahan untuk melakukan perjalanan

wisata keluarga, Obama berharap setiap warga Kuba yang memiliki dan terikat oleh hubungan keluarga dengan warga Amerika Serikat akan lebih mudah mengakses perjalanan ke Amerika Serikat begitu juga sebaliknya. Selain itu, *Remove Restrictions on Remittances* yang berisikan penghapusan pembatasan remitansi dan pengiriman uang ke Kuba. Kebijakan ini memberikan otoritas setiap individu untuk mengirim uang dalam tiga derajat hubungan keluarga (misalnya sepupu kedua). Tujuan mendasar dari kebijakan ini adalah untuk memudahkan dalam arus transaksi antara Amerika Serikat-Kuba terutama bagi mereka yang terikat oleh hubungan kekeluargaan. Pasalnya sejak diberlakukannya pembatasan pengiriman uang antara kedua negara, banyak dari mereka yang sangat kesulitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Sehingga Obama berharap setelah diberlakukannya kebijakan yang baru maka akan membawa dampak baik seperti kemudahan dalam melakukan transaksi diantara kedua negara.

Selanjutnya kebijakan *Authorize Greater Telecommunications Link with Cuba* yang berisikan penghapusan kebijakan mengenai pembatasan akses telekomunikasi dengan Kuba. kebijakan tersebut akan lebih memudahkan setiap individu untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan akses informasi antara kedua negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah Amerika Serikat memberikan peluang bagi para penyedia jaringan telekomunikasi untuk membangun fasilitas kabel dan satelit telekomunikasi serta optik yang akan menghubungkan kedua negara. Kemudian kebijakan yang terakhir adalah *Revise Gift Parcel Regulations* yang berisikan cakupan sumbangan kemanusiaan dengan melakukan revisi terhadap peraturan pemberian hadiah parcel yang memenuhi syarat untuk ekspor. Pemerintah juga memberikan keterangan barang-barang yang diperbolehkan untuk menjadi hadiah seperti pakaian barang-barang kebersihan pribadi, bibit, obat-obatan hewan, perlengkapan dan lain-lain (Nurinayah, 2016, hal. 58-62)

.Obama menaruh harapan yang besar atas diberlakukannya kebijakan *Reaching Out Cuban People* terutama untuk membuka kembali komunikasi yang telah lama usang dengan Kuba. Selain itu Obama percaya bahwa melalui pendekatan yang lebih intens diantara kedua negara maka Amerika Serikat dapat membantu Kuba menjadi negara yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia seperti menjunjung norma kebebasan (*liberty*) dalam pemerintahannya.

Pada bulan Desember 2014 menjadi *moment* paling penting bagi perjalanan sejarah Washington-Havana. Pencapaian terbaik telah berhasil digapai melalui kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik yang melibatkan antara orang nomor satu di kedua negara. Melalui negosiasi yang cukup panjang pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Kuba akhirnya menyepakati untuk mengakhiri kebekuan hubungan yang pernah terjadi diantara kedua negara. Mereka yakin bahwa Amerika Serikat dan Kuba akan melangkah bersama-sama untuk menciptakan sejarah baru yang lebih harmonis.

Hubungan antara Amerika Serikat-Kuba semakin menunjukkan hasil yang lebih positif terutama pada pertemuan Obama-Castro di Panama. Pada 11 April 2015 Obama dan Raul Castro bertemu dalam KTT Kawasan Amerika di Panama. Pertemuan tersebut melibatkan antara orang nomor satu di kedua negara, yaitu Presiden Barack Obama dan Presiden Raul Castro. Obama menyebutkan bahwapertemuan tersebut merupakan suatu pertemuan yang paling bersejarah. Pertemuan itu akan membuka jalan bagi normalisasi hubungan yang tampaknya tidak pernah terpikirkan bagi rakyat Kuba dan Amerika Serikat selama beberapa generasi. Di ruang konferensi kecil di tengah konvensi di ibukota Panama City, Obama dan Presiden Kuba Raul Castro duduk berdampingan. Mereka ingin menghadirkan momentum baru untuk memulihkan hubungan diplomatik. Obamamembuka obrolannya dengan berkata "*Our*

governments will continue to have differences,” lebih lanjut Obama mengatakan *“At the same time, we agreed that we can continue to take steps forward that advance our mutual interests.”*

Berdasarkan pernyataan itu, Obama telah menegaskan bahwa walaupun terdapat perbedaan diantara kedua negara namun mereka sepakat untuk melangkah bersama demi kepentingan bersama antara Washington-Havana. Obama juga mengatakan bahwa Amerika Serikat bersedia untuk membantu Kuba mengokohkan pembangunan di negaranya. Pada bulan Mei 2015 pemerintah Amerika Serikat menetapkan keputusannya untuk menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme hal itu dianggap sebagai wujud nyata dari keseriusan mereka untuk kembali bersahabat dengan Kuba. Sebelum resmi menghapus Kuba dari daftar sponsor terorisme, Obama terlebih dahulu telah mengusulkan inisiatifnya tersebut pada 14 April 2015. Pencabutan status negara sponsor terorisme terhadap Kuba dilakukan dengan perundingan yang begitu panjang mengingat banyak pihak yang sebenarnya tidak setuju atas keputusan presiden Obama. Namun dengan berbagai upaya negosiasi antara presiden dan kongres maka secara resmi. Pasca penghapusan status negara sponsor terorisme terhadap Kuba, Obama berharap berbagai agenda selanjutnya akan kembali dirundingkan oleh kedua negara, begitupun Raul Castro. Castro semakin yakin bahwa langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat akan membawa kedua negara mencapai suatu perubahan yang lebih baik terutama bagi masa depan Kuba.

Pada 20 Juli 2015 Washington-Havana kembali mengukir sejarah baru dengan membuka kembali kantor kedutaan di masing-masing negara. Amerika Serikat yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry memulai serangkaian kegiatan untuk meresmikan kantor kedutaan mereka di Havana. Di hari yang bersejarah itu, John Kerry membuka sambutannya dengan berkata *“a historic day, and a day for removing barriers”* (Badella, 2015, hal. 8-11).

Pernyataan Kerry seolah-olah mengingatkan bahwa kedua negara telah menghapus jejak-jejak kelam masa lalu yang pernah terjadi.

Dari penjelasan diatas, upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Kuba melalui proses yang panjang. Diawali adanya pergantian presiden di Kuba dan di Amerika Serikat, kemudian adanya perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden terpilih Amerika Serikat Barack Obama dengan presiden yang sebelum-sebelumnya. Perubahan kebijakan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Obama terhadap Kuba, yang notabnya dianggap musuh selama kurang lebih 5 dekade ini menarik untuk diamati pada bab selanjutya.